

Apa Itu Ideologi ?

Realitas, Subjek, dan Struktur Makna dalam Tafsir Sosial.



Oleh : Ahmad Wansa Al-faiz

Abstrak.

Paper ini bertujuan untuk mengkaji konsep ideologi tidak sebagai sekadar sistem gagasan, melainkan sebagai struktur mendasar yang membentuk cara subjek memahami realitas. Berangkat dari asumsi bahwa realitas selalu dimaknai melalui posisi subjek yang tidak netral, tulisan ini menempatkan ideologi sebagai medium epistemik yang bekerja sebelum, selama, dan sesudah proses penafsiran. Dengan pendekatan filosofis-kritis, serta merujuk pada pemikiran tokoh seperti Karl Marx, Louis Althusser, dan Slavoj Žižek, paper ini menunjukkan bahwa ideologi bukan sekadar isi pemikiran, tetapi cara berpikir itu sendiri. Implikasi dari pemahaman ini mengarah pada pentingnya kesadaran kritis terhadap narasi, sejarah, dan posisi subjek dalam produksi makna sosial.

Pendahuluan.

Pertanyaan “apa itu ideologi” seringkali direduksi menjadi definisi normatif: sistem gagasan, keyakinan, atau doktrin tertentu. Namun reduksi ini mengabaikan dimensi paling fundamental dari ideologi, yaitu perannya sebagai struktur yang membentuk kemungkinan berpikir itu sendiri.

Realitas, dalam pengertian ini, tidak pernah hadir secara langsung. Ia selalu dimediasi oleh subjek yang telah terbentuk oleh sejarah, bahasa, dan relasi sosial. Oleh karena itu, memahami ideologi berarti memahami bagaimana realitas dimungkinkan untuk dimaknai.

Tulisan ini berangkat dari tesis :

realitas yang dimaknai selalu merupakan hasil dari posisi subjek ideologis yang aktif dalam proses penafsiran.

I. Realitas dan Subjek: Tidak Ada Tafsir yang Netral.

Pemahaman tentang relasi antara subjek dan realitas telah menjadi perhatian utama dalam filsafat modern. Apa yang disebut sebagai “realitas objektif” selalu telah melalui proses interpretasi.

Menurut Karl Marx, kesadaran manusia dibentuk oleh kondisi material dan relasi produksi. Dengan demikian, apa yang dianggap sebagai kebenaran sering kali merupakan refleksi dari struktur sosial tertentu.

Louis Althusser memperluas gagasan ini dengan konsep **interpellation**, di mana individu dipanggil menjadi subjek melalui ideologi. Subjek tidak berdiri di luar ideologi, tetapi merupakan produk dari ideologi itu sendiri.

Sementara itu, Slavoj Žižek menekankan bahwa ideologi bekerja pada tingkat ketidaksadaran. Bahkan ketika individu menyadari keberadaan ideologi, ia tetap tidak sepenuhnya dapat keluar darinya.

Dengan demikian:

- tidak ada subjek sebelum ideologi; yang ada adalah subjek yang selalu sudah ideologis.

II. Ideologi sebagai Medium Tafsir.

Ideologi tidak dapat dipahami hanya sebagai kumpulan gagasan eksplisit. Ia adalah medium yang memungkinkan proses tafsir berlangsung.

Karakteristik ideologi:

1. Implisit dan tidak selalu disadari.
2. Mendahului kesadaran reflektif.
3. Mengatur horizon makna.

Dengan demikian:

ideologi bukan apa yang kita pikirkan, tetapi bagaimana kita berpikir.

III. Narasi, Bahasa, dan Memori Kolektif.

Bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga alat produksi makna. Narasi membentuk cara masyarakat memahami sejarah dan realitas.

Perbedaan respons terhadap istilah yang sama—misalnya “**ideologi**”—menunjukkan bahwa makna ditentukan oleh:

- pengalaman historis.
- memori kolektif.
- posisi sosial.

Dalam konteks ini:

- narasi adalah arena di mana ideologi diproduksi, direproduksi, dan dipertarungkan.

IV. Ideologi, Sejarah, dan Problem Preseden.

Sejarah sering dijadikan dasar legitimasi dalam kehidupan sosial dan politik. Namun terdapat problem mendasar:

- tidak semua preseden historis layak dijadikan norma.

Masalah yang muncul:

1. Repetisi non-produktif.

Pengulangan pola konflik atau kegagalan masa lalu

2. Sakralisasi sejarah.

Sejarah diperlakukan sebagai kebenaran final

3. Reduksi kompleksitas.

Narasi sejarah disederhanakan demi kepentingan tertentu

Dalam kondisi ini, sejarah kehilangan fungsi kritisnya dan berubah menjadi alat ideologis.

V. Ilusi Netralitas dan Anti-Ideologi.

Salah satu problem kontemporer adalah munculnya sikap anti-ideologi. Ideologi dianggap berbahaya karena diasosiasikan dengan fanatisme dan otoritarianisme.

Namun, sikap ini justru melahirkan paradoks: penolakan terhadap ideologi sering kali merupakan bentuk ideologi yang tidak disadari.

Ilusi netralitas membuat individu:

- merasa objektif
- tetapi sebenarnya mereproduksi struktur makna dominan

Fenomena seperti Phantom Time Theory menunjukkan bagaimana lemahnya kesadaran historis dapat membuka ruang bagi distorsi narasi.

VI. Ideologi dan Keterlambatan Epistemik

Keteringgalan suatu masyarakat tidak hanya bersifat material, tetapi juga epistemik.

Ciri keterlambatan epistemik:

- lemahnya tradisi kritik
- minimnya kesadaran ideologis

- ketergantungan pada narasi instan

Akibatnya:

- masyarakat rentan terhadap manipulasi
- sulit menghasilkan pengetahuan mandiri
- tertinggal dalam kompetisi global

Dengan demikian:

kemajuan tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi pada cara berpikir.

VII. Implikasi: Menuju Kesadaran Kritis

Pemahaman ideologi sebagai medium tafsir menuntut perubahan pendekatan:

1. Dari objektivitas semu → kesadaran posisi
2. Dari penolakan ideologi → refleksi ideologis
3. Dari reproduksi narasi → kritik narasi

Kesadaran kritis tidak menghapus ideologi, tetapi:

membuat ideologi dapat dipertanggungjawabkan secara reflektif.

Kesimpulan

Ideologi bukan sekadar sistem gagasan, tetapi struktur yang memungkinkan realitas dipahami. Setiap tafsir selalu melibatkan subjek ideologis, sehingga tidak ada pemahaman yang sepenuhnya netral.

Masalah utama bukan pada keberadaan ideologi, tetapi pada ketidaksadaran terhadap cara ideologi bekerja. Tanpa kesadaran kritis, sejarah dapat berubah menjadi alat legitimasi, dan narasi dapat menjadi sarana manipulasi.

Dengan demikian:

ideologi harus dipahami bukan untuk dihindari, tetapi untuk disadari dan dikritisi.

Pancasila, Ideologi, dan Ilusi Netralitas: Kritik Narasi di Tengah Keterlambatan Kesadaran.

Di tengah kegamangan publik terhadap kata “**ideologi**”, kita justru berhadapan dengan paradoks yang jarang disadari: semakin kuat penolakan terhadap ideologi, semakin besar kemungkinan kita terperangkap dalam ideologi yang tidak kita kenali. Kata itu terdengar berat, bahkan berbahaya—seolah ia selalu identik dengan fanatisme, otoritarianisme, dan pengkultusan. Namun ketakutan itu sendiri, jika tidak dikritik, justru menjadi pintu masuk bagi bentuk ketidaksadaran baru.

Sejarah telah memberi trauma yang cukup untuk membuat ideologi dicurigai. Dari ekstremitas rezim totalitarian hingga manipulasi narasi kekuasaan, ideologi sering tampil sebagai alat dominasi. Tetapi menjadikan pengalaman itu sebagai alasan untuk menolak ideologi sepenuhnya adalah kesalahan konseptual. Sebab pada kenyataannya, tidak ada masyarakat yang benar-benar hidup tanpa ideologi. Yang ada hanyalah ideologi yang tidak diakui sebagai ideologi.

Di titik ini, kita perlu berhenti sejenak dan bertanya: apakah yang kita tolak benar-benar ideologi, atau justru bayangan buruk tentang ideologi?

Narasi, Tafsir, dan Subjek yang Tidak Pernah Netral.

Setiap narasi—baik sejarah, politik, maupun sosial—tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu berjumpa dengan penafsir. Dan penafsir tidak pernah datang dalam keadaan kosong. Ia membawa pengalaman, memori kolektif, dan struktur nilai yang telah membentuk cara berpikirnya jauh sebelum ia membaca sebuah teks.

Inilah mengapa bahasa yang sama bisa melahirkan respons yang berbeda. Kata “**ideologi**”, misalnya, bagi sebagian orang adalah perangkat berpikir, tetapi bagi yang lain adalah ancaman. Perbedaan ini bukan sekadar soal definisi, melainkan soal posisi—dari mana seseorang melihat.

Dalam kerangka ini, kita tidak menafsirkan dunia secara langsung. Kita menafsirkan dunia melalui struktur makna yang sudah bekerja dalam diri kita. Dengan kata lain, yang aktif dalam tafsir bukan hanya narasi, tetapi juga ideologi subjek yang membaca narasi itu.

Pancasila: Simbol, Nilai, dan Ruang Publik.

Di tengah kompleksitas ini, Pancasila menempati posisi yang unik. Ia bukan ideologi dalam pengertian tertutup yang memonopoli kebenaran, tetapi juga tidak bisa disebut sebagai sesuatu yang bebas dari dimensi ideologis. Pancasila adalah simbolisasi nilai yang bekerja dalam ranah publik—**res publica**—bukan untuk mengatur keyakinan privat (**res privata**), tetapi untuk memungkinkan koeksistensi dalam perbedaan.

Masalahnya muncul ketika Pancasila berhenti sebagai ruang tafsir dan berubah menjadi slogan. Ketika ia tidak lagi dikritik, tidak lagi dibaca ulang, dan hanya diulang sebagai retorika, maka ia kehilangan daya hidupnya. Ia tidak lagi menjadi alat emansipasi, melainkan sekadar ornamen legitimasi.

Padahal, jika kembali pada maksud awalnya, Pancasila adalah upaya untuk menjembatani konflik sosial dan menepis hambatan sosiologis yang tidak produktif. Ia lahir dari sejarah, tetapi tidak dimaksudkan untuk membekukan sejarah.

Sejarah: Preseden atau Perangkap?

Di sinilah persoalan menjadi lebih serius. Sejarah sering diperlakukan sebagai preseden yang harus diikuti, bukan sebagai pengalaman yang harus dikritik. Kita cenderung

mengulang pola-pola lama tanpa cukup refleksi, seolah setiap yang historis memiliki legitimasi normatif.

Padahal tidak semua yang pernah terjadi layak untuk diulang.

Ketika sejarah tidak dikritik, ia berubah dari sumber pembelajaran menjadi perangkap. Ia tidak lagi membantu kita memahami masa kini, tetapi justru menyeret kita kembali ke pola yang sama. Konflik sosial, kecelakaan politik, dan kegagalan kolektif bisa muncul kembali dalam bentuk yang berbeda, tetapi dengan struktur yang serupa.

Dalam konteks ini, Pancasila seharusnya bekerja sebagai mekanisme untuk mengingat sejarah secara kritis—bukan untuk mengulanginya.

Ilusi Netralitas dan Bahaya Anti-Ideologi.

Salah satu gejala paling problematis dalam masyarakat hari ini adalah ilusi netralitas. Banyak yang menganggap bahwa dengan menolak ideologi, mereka telah mencapai posisi objektif. Padahal, penolakan itu sendiri sering kali merupakan posisi ideologis yang tidak disadari.

Di sinilah ironi terjadi: mereka yang paling yakin bahwa dirinya netral justru sering menjadi reproduktor ideologi dominan. Tanpa kesadaran kritis, narasi yang ada diterima begitu saja, tanpa diuji, tanpa dipertanyakan.

Fenomena seperti Phantom Time Theory memang ekstrim, tetapi ia menunjukkan sesuatu yang lebih dalam: ketika kesadaran historis melemah, ruang bagi distorsi akan terbuka lebar. Bukan karena waktu benar-benar hilang, tetapi karena kemampuan membaca sejarah secara kritis ikut menghilang.

Keterlambatan yang Tidak Terlihat.

Kita sering berbicara tentang ketertinggalan—dalam teknologi, ekonomi, atau infrastruktur. Namun ada keterlambatan yang lebih mendasar: keterlambatan dalam cara berpikir.

Keterbatasan ini terlihat dalam:

- 1. minimnya tradisi kritik**
- 2. lemahnya kemampuan membaca narasi**
- 3. kecenderungan menerima makna secara instan**

Akibatnya, kita lebih mudah melihat “**jurang**” di depan mata—masalah eksternal yang jelas—daripada mengakui kelemahan internal yang lebih sulit diterima.

Padahal, kemajuan tidak hanya ditentukan oleh apa yang kita lihat, tetapi oleh bagaimana kita melihat.

Menjembatani Kritik dan Kesadaran.

Jika ada jalan keluar, ia tidak terletak pada penolakan ideologi, tetapi pada pematangan cara kita berhadapan dengannya. Kita tidak bisa keluar dari ideologi, tetapi kita bisa menyadari bagaimana ia bekerja dalam diri kita.

Di sinilah kritik narasi menjadi penting:

- **bukan untuk menghancurkan makna**
- **tetapi untuk membuka kemungkinan makna**
- **bukan untuk menolak sejarah**
- **tetapi untuk mencegahnya menjadi beban yang berulang**

Pancasila, dalam bentuk terbaiknya, dapat menjadi ruang bagi proses ini—sebuah kerangka etis yang memungkinkan masyarakat untuk terus menafsir ulang dirinya sendiri tanpa kehilangan pijakan.

Penutup.

Bahaya terbesar bukan pada ideologi itu sendiri, melainkan pada ketidaksadaran kita terhadap cara ideologi bekerja dalam memahami realitas. Demikian pula, ancaman terbesar bukan pada kemungkinan sejarah dimanipulasi, tetapi pada ketidakmampuan kita untuk mengkritik cara kita membaca sejarah.

Sebuah jurang mungkin terlihat jelas di hadapan mata, dan karena itu bisa dihindari. Tetapi kelemahan dalam cara berpikir—yang tersembunyi di balik rasa percaya diri—justru lebih sulit diatasi.

Dan mungkin disitulah tantangan terbesar kita sebagai bangsa: bukan sekadar bergerak maju, tetapi ***belajar memahami bagaimana kita memahami dunia itu sendiri.***

VIII. Ideologi, Pancasila, dan Kontestasi Narasi di Indonesia.

Dalam konteks Indonesia, diskursus ideologi tidak dapat dilepaskan dari posisi **Pancasila**, sebagai dasar negara sekaligus simbol nilai kolektif. Namun, seperti telah dibahas sebelumnya, ideologi tidak hanya hadir dalam bentuk eksplisit, tetapi juga dalam praktik sosial dan narasi yang berkembang di masyarakat.

Pancasila sering dipahami secara formal sebagai dasar normatif negara. Namun dalam praktiknya, ia juga berfungsi sebagai:

- **ruang negosiasi makna sosial.**
- **medium legitimasi politik.**
- **arena kontestasi ideologis.**

Dengan demikian, Pancasila tidak berada di luar ideologi, melainkan menjadi bagian dari dinamika ideologis itu sendiri.

1. Pancasila sebagai Ideologi Terbuka.

Berbeda dengan ideologi tertutup, Pancasila memiliki karakter:

- tidak dogmatis
- terbuka terhadap reinterpretasi
- berbasis nilai, bukan doktrin teknis

Hal ini memungkinkan Pancasila berfungsi sebagai:

kerangka etis dalam mengelola pluralitas masyarakat Indonesia.

Namun, keterbukaan ini juga membawa risiko:

- tafsir yang terlalu longgar
- manipulasi oleh kepentingan politik
- reduksi menjadi slogan simbolik

2. Politik Identitas dan Fragmentasi Narasi.

Dalam perkembangan kontemporer, Indonesia menghadapi tantangan berupa meningkatnya politik identitas. Narasi berbasis agama, etnis, dan kelompok sosial tertentu sering kali digunakan untuk:

- membangun solidaritas internal
- sekaligus menciptakan eksklusivitas terhadap kelompok lain

Dalam kerangka ideologi, fenomena ini menunjukkan bahwa:

narasi identitas adalah bentuk konkret dari kerja ideologi dalam ruang sosial.

Masalahnya bukan pada keberagaman itu sendiri, tetapi pada:

- absolutisasi identitas
- penutupan ruang dialog
- delegitimasi pihak lain

3. Sejarah sebagai Arena Kontestasi.

Sejarah Indonesia juga menjadi medan perebutan makna. Peristiwa-peristiwa tertentu:

- ditafsirkan ulang
- disederhanakan
- atau bahkan dipolitisasi

Akibatnya, sejarah tidak lagi berfungsi sebagai sumber pembelajaran, tetapi sebagai:

alat legitimasi ideologis dalam konflik kontemporer.

Dalam kondisi ini, kritik terhadap sejarah menjadi sangat penting untuk mencegah:

- reproduksi konflik
- pembekuan narasi
- manipulasi memori kolektif

4. Pancasila sebagai Jembatan Kritik Narasi

Dalam menghadapi berbagai problem tersebut, Pancasila memiliki potensi strategis sebagai:

- platform dialog
- kerangka etis bersama
- mekanisme pengelolaan konflik

Namun, potensi ini hanya dapat terwujud jika:

- Pancasila tidak disakralkan secara dogmatis
- tetap terbuka terhadap kritik
- digunakan sebagai alat refleksi, bukan alat kontrol

Dengan demikian:

Pancasila harus diposisikan sebagai ideologi reflektif, bukan ideologi represif.

IX. Relevansi Global dan Tantangan Masa Depan

Dalam era globalisasi, ideologi tidak lagi terbatas pada batas negara. Arus informasi yang cepat mempercepat:

- penyebaran narasi global
- pertemuan berbagai ideologi
- sekaligus konflik makna

Indonesia, dalam hal ini, menghadapi dua tantangan utama:

1. Integrasi Global

- kemampuan bersaing dalam produksi pengetahuan
- adaptasi terhadap perubahan teknologi

2. Stabilitas Internal

- menjaga kohesi sosial
- mengelola perbedaan ideologis

Tanpa kesadaran ideologis yang matang, masyarakat berisiko:

- menjadi konsumen pasif narasi global
- kehilangan kemampuan kritik
- mengalami disorientasi identitas

X. Kesimpulan Akhir.

Ideologi bukan sekadar sistem gagasan yang dapat dipilih atau ditolak, melainkan struktur yang membentuk cara manusia memahami realitas. Dalam konteks Indonesia, Pancasila menunjukkan bahwa ideologi dapat berfungsi sebagai kerangka etis yang terbuka, selama tidak dibekukan menjadi dogma.

Masalah utama bukan pada keberadaan ideologi, tetapi pada:

- ketidaksadaran terhadap cara kerjanya
- kegagalan dalam mengkritik narasi
- serta kecenderungan mengulang sejarah tanpa refleksi

Dengan demikian, tantangan utama ke depan adalah:

membangun kesadaran ideologis yang reflektif, kritis, dan bertanggung jawab dalam membaca realitas sosial.

Pembinaan Ideologi Pancasila Untuk Apa ? Siapa yang Berkompeten, dan Mengapa Saya Tidak Perlu Menjadi Sukarno.

Ada satu momen yang janggal sekaligus problematik: ketika saya diminta menjadi pembicara dalam forum bertajuk **“Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan”**—tanpa kejelasan arah, tanpa definisi operasional, bahkan tanpa kejelasan nilai apa yang sebenarnya hendak dibina.

Pertanyaan pertama yang muncul bukanlah ***apa yang harus saya sampaikan***, tetapi:

“Pembinaan ideologi Pancasila ini sebenarnya untuk apa ?”

Ideologi yang Kehilangan Orientasi.

Dalam sejarah pemikiran, istilah ideologi tidak pernah netral. Sejak **“Karl Marx”, “German philosopher”**, ideologi dipahami sebagai sesuatu yang dapat menutupi realitas material. Ia bukan hanya sistem gagasan, tetapi juga dapat menjadi alat legitimasi kekuasaan.

Ketika istilah **“pembinaan ideologi”** digunakan tanpa kejelasan arah, ia berpotensi berubah menjadi:

- slogan administratif
- retorika simbolik
- bahkan instrumen mobilisasi politik

Masalahnya bukan pada Pancasila sebagai dasar negara, melainkan pada cara ia diproduksi dalam wacana publik.

Dalam banyak kasus, “**pembinaan**” justru: *tidak membina kesadaran, tetapi mereproduksi kepatuhan.*

Antara,"Soekarno", "first President of Indonesia", dan Generasi yang Tidak Mengalaminya**

Saya bukan bagian dari generasi yang mengalami langsung pergulatan historis entity["people","Soekarno","first President of Indonesia"]. Saya tidak hidup dalam konteks revolusi, tidak berada dalam tekanan kolonialisme, dan tidak menyaksikan secara langsung bagaimana Pancasila dirumuskan sebagai jalan tengah.

Maka menjadi “Soekarno” dalam pengertian romantik-historis bukan hanya tidak relevan, tetapi juga problematik.

Sebab: menghidupkan masa lalu tanpa memahami konteksnya adalah bentuk lain dari distorsi sejarah.

Yang dibutuhkan hari ini bukanlah loyalitas simbolik terhadap tokoh, tetapi:

- kemampuan membaca konteks kekinian
- keberanian mengkritik narasi
- dan kesadaran bahwa sejarah bukan untuk disembah, melainkan untuk dipahami

Siapa yang Berkompeten ?

Pertanyaan berikutnya lebih serius: siapa yang sebenarnya berhak dan kompeten melakukan “**pembinaan ideologi**” ?

Dalam praktiknya, kegiatan semacam ini sering kali diambil alih oleh:

- tim politisi
- aktor kekuasaan
- atau kelompok yang memiliki kepentingan elektoral

Padahal, jika berbicara tentang ideologi sebagai struktur berpikir, maka kompetensi seharusnya berada pada:

- akademisi
- sejarawan

- filsuf
- dan institusi pendidikan

Ketika forum publik melampaui fungsi kampus, jurusan sejarah, atau lembaga riset, yang terjadi adalah:

pergeseran dari ruang refleksi menjadi ruang mobilisasi.

Dan di titik ini, “**pembinaan ideologi**” berubah menjadi:

- kampanye terselubung
- legitimasi kekuasaan
- atau sekadar produksi citra

Krisis Kepercayaan dan Manipulasi Narasi.

Kita hidup dalam situasi di mana indeks kepercayaan publik terhadap figur politik mengalami erosi. Dalam kondisi seperti ini, penggunaan istilah “ideologi” menjadi semakin problematik.

Mengapa ?

Karena publik tidak lagi melihat ideologi sebagai nilai, tetapi sebagai:

- alat manipulasi
- retorika kosong
- atau strategi elektoral

Fenomena ini memperlihatkan bahwa:

krisis utama kita bukan pada kekurangan ideologi, tetapi pada kelebihan ideologi yang tidak jujur.

Risiko yang Saya Ambil.

Saya sadar, menerima undangan untuk berbicara dalam forum semacam ini berarti mengambil risiko.

Risiko untuk:

- mempertajam kritik di tengah forum normatif
- menjembatani kekacauan narasi
- dan mungkin, berhadapan dengan ekspektasi yang tidak sejalan

Namun justru disitu letak tanggung jawab intelektual.

Bukan untuk mengulang apa yang sudah disepakati, tetapi:

membuka ruang pertanyaan yang selama ini dihindari.

Melampaui Seremonial: Mengembalikan Fungsi Akademis.

Salah satu problem terbesar dari “pembinaan ideologi” hari ini adalah kecenderungannya melampaui fungsi akademis.

Alih-alih menjadi:

- ruang diskusi kritis
- arena pertukaran gagasan
- atau proses pembentukan kesadaran

ia justru menjadi:

- acara seremonial
- kegiatan formal tanpa substansi
- atau forum satu arah

Padahal, jika ideologi benar-benar ingin dipahami, maka tempatnya adalah:

- kampus
- ruang riset
- dan tradisi intelektual yang hidup

Penutup: Untuk Apa Semua Ini ?

Pada akhirnya, *pertanyaan awal tetap berdiri:*

pembinaan ideologi Pancasila ini untuk apa ?

Jika jawabannya adalah:

- untuk menciptakan kesadaran → maka dibutuhkan kritik
- untuk memperkuat persatuan → maka dibutuhkan dialog
- untuk menjaga negara → maka dibutuhkan kejujuran

Namun jika yang terjadi adalah:

- reproduksi slogan
- mobilisasi politik
- dan manipulasi narasi

maka yang kita lakukan bukan pembinaan, **melainkan:**

pengosongan makna ideologi itu sendiri.

Catatan Kaki.

1. Karl Marx, **The German Ideology** – konsep kesadaran dan relasi material.
2. Louis Althusser, **Ideology and Ideological State Apparatuses** – konsep interpellation.
3. Slavoj Žižek, **The Sublime Object of Ideology** – ideologi dalam struktur ketidaksadaran.

Daftar Pustaka (Format Akademik Sederhana).

- "Karl Marx","German philosopher"]. **The German Ideology.**
- "Louis Althusser","French philosopher"]. - **Ideology and Ideological State Apparatuses.**
- "Slavoj Žižek","Slovenian philosopher"]. **The Sublime Object of Ideology.**
- "Antonio Gramsci","Italian Marxist philosopher"]. **Selections from the Prison Notebooks.**
- "Michel Foucault","French philosopher"]. **Power/Knowledge.**
- "Paul Ricoeur","French philosopher"]. **Interpretation Theory.**